



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
UNIT KERJA : PERUMDA TIRTA ALBANTANI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ELI MULYADI**
2. Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**
3. NHK : **256991**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.320.980.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m²/45 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m²/54 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2200 m²/248 m² di KAB / KOTA LEBAK, WARISAN Rp. 270.980.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m²/250 m² di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m²/45 m² di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
6. Tanah Seluas 11760 m² di KAB / KOTA LEBAK, Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.418.940.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 496.000.000
2. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BBP A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOTOR, SUZUKI GSX R150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.



15.000.000

6. LAINNYA, OLIVER 58 MESIN PERCETAKAN Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

7. LAINNYA, POLAR MESIN POTONG KERTAS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

8. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 422.940.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 317.537.500

D. SURAT BERHARGA

Rp. 1.250.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 368.285.834

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 7.675.743.334

III. HUTANG

Rp. 1.880.271.650

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.795.471.684

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.